

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tuntutan kemerdekaan Catalonia pada dasarnya sudah terjadi sejak pemerintahan diktator Fransisco Franco karena adanya perubahan pada sistem pemerintahan Spanyol. Beberapa perubahan kebijakan pada saat kepemimpinan Franco berkaitan dengan larangan penggunaan atribut dan bahasa daerah serta sentralisasi kekuasaan di Ibu kota. Pemerintahan jenderal Franco yang otoriter dengan karakter fasis menimbulkan pergolakan dan protes dari masyarakat daerah yang bukan berasal dari ibu kota. Catalonia menjadi salah satu wilayah otonom yang diberi wewenang khusus karena dianggap sebagai wilayah bersejarah berdasarkan undang-undang khusus sebelum pemerintahan Franco. Pada tahun-tahun pertama pemberian kekuasaan otonomi khusus, pemerintah Catalonia sangat memanfaatkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dengan melakukan aktivitas eksternal melalui paradiplomasi, namun beberapa tindakan politik bertujuan untuk mencapai pengakuan internasional atas perbedaan identitas Catalonia. Upaya awal sebelum pergolakan upaya pemisahan diri yang dilakukan pemerintah Catalonia adalah melalui referendum Statuta Catalonia tahun 2006 terutama yang mengatur persoalan hubungan luar negeri sekaligus menjadi undang-undang yang mengidentifikasikan Catalonia sebagai wilayah otonomi dengan kekuasaan luas. Adanya kebijakan baru dalam Statuta 2006 menghasilkan

kebijakan luar negeri berupa rencana aksi luar negeri lima tahun atau *Foreign Action Plan 2010-2015* dan *Foreign Action Plan 2015-2020* yang menimbulkan konflik karena dianggap menyalahi aturan pemerintah pusat dan menjadi alat untuk menyuarakan kemerdekaan.

Berdasarkan hasil analisis menurut teori konsep yang dinyatakan Der Darian mengenai protodiplomasi, upaya pemisahan diri pemerintahan Catalonia dari Spanyol dipengaruhi oleh tindakan entitas sub-unit negara yang diperkuat dengan dukungan entitas non-pemerintah lainnya mencakup masyarakat dan organisasi pro-kemerdekaan. Upaya mencari dukungan untuk merdeka tidak hanya dilakukan secara internal, namun juga secara eksternal dengan mencari dukungan internasional atau *International Legitimacy*. Berikut upaya protodiplomasi yang dilakukan Catalonia berdasarkan peran aktor negara dan non-negara.

1. Peran Pemerintah Catalonia sebagai Sub-Unit negara

Ada tiga aspek penting yang menjadi strategi pemerintah Catalonia untuk mendukung upaya-upaya pemisahan diri secara internal mencakup Pemilihan Umum dalam referendum 2015 dan 2017, pembentukan *Foreign Action Plan (FAP) 2010-2015* dan *FAP 2015-2020*, serta aliansi partai politik pro-kemerdekaan. *FAP 2010-2015* berfokus pada diplomasi publik dan pembentukan DIPLOCAT (Dewan Diplomasi Publik Catalonia) sedangkan *FAP 2015-2020* fokus pada pembangunan ekonomi dan investasi dengan pembentukan RIS3CAT. Upaya dalam mencari dukungan eksternal lainnya juga dilakukan melalui DIPLOCAT yang berperan atas diplomasi digital dan penyelenggaraan konferensi

internasional. Selanjutnya pada FAP 2015-2020 strategi dalam mencari dukungan internasional ada pada pembentukan RIS3CAT yang menjadi strategi untuk memperkuat basis ekonomi catalonia dan menarik investasi asing. Hal ini terbukti karena pemerintah Catalonia berhasil mendapat dana investasi dari ERDF (*European Regional Development Fund*) untuk proyek investasi sebesar 109 Miliar Euro.

2. Peran dan Dukungan Entitas non-Pemerintah

Protodiplomasi tidak hanya dilakukan oleh entitas sub-unit negara, namun dilakukan oleh entitas lain seperti grup nasionalis dan aktivis yang berkaitan dengan kebudayaan dan promosi nasional. Dalam konteks pemisahan diri Catalonia, terdapat organisasi nasionalis yang mencakup masyarakat Catalan dan beberapa organisasi pro-kemerdekaan. Masyarakat memiliki peran besar dalam pemilihan umum dan demonstrasi di jalanan Barcelona dan menyuarakan keinginan untuk merdeka. Ada dua organisasi pro-kemerdekaan Catalan terbesar, yaitu ANC (*Assemblea Nacional Catalana*) dan *Omnium Cultural* yang mendukung otonomi catalunya. Di sisi lain, branding club sepakbola besar FC Barcelona juga memegang peran penting dalam mendapatkan pengakuan internasional. FC Barcelona menjadi “Ambasador” atau simbol nasionalisme Catalonia.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam *Foreign Action Plan* memang menjadi alat yang dianggap legal oleh pemerintah Catalonia untuk menjalankan tindakan paradiplomasi dengan negara lain, namun tidak hanya dengan FAP saja melainkan ada banyak peran entitas lain yang lebih

kompleks untuk mewujudkan upaya protodiplomasi atau pemisahan diri pemerintah Catalonia dari Spanyol.

4.2 Saran

Mengingat permasalahan antara pemerintah Catalonia dengan Spanyol atas tuntutan kemerdekaan masih berlanjut hingga saat ini dan belum menemukan titik temu yang jelas, peneliti merekomendasikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya protodiplomasi pemerintah Catalonia saat ini, terutama sejak tahun 2017 pasca referendum dan setelah ditangkapnya beberapa tokoh pemimpin yang terlibat dalam upaya pemisahan diri dan deklarasi kemerdekaan yang tidak diakui.

